

**KAPABILITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA  
PEKANBARU DALAM MENGELOLA DRAINASE DI KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2023-2024**

**Oleh : Tio Dwiyani Permana**  
**Pembimbing : Dr. Muchid, S.Sos., M. Phil**  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*This study discusses the capability of the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) of Pekanbaru City in managing drainage within the city during 2023–2024. The study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques consisting of document analysis, field observation, and interviews with relevant stakeholders within the PUPR Office. The theoretical framework used in this research is Leonard-Barton's (1992) concept of Core Capabilities, which includes four main dimensions: Knowledge and Skills, Technical Systems, Managerial Systems, and Values and Norms. The results of the study indicate that the capability of the Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City in managing drainage remains reactive. Several obstacles were identified, including limited budget allocation, insufficient technical expertise of human resources, low community awareness regarding drainage cleanliness, and weak coordination between divisions within the PUPR Office. This research concludes that drainage governance in Pekanbaru has not yet operated optimally, as the current approach predominantly focuses on short term operational actions rather than strategic, data-driven planning. Therefore, integrating information technology, improving human resource capacity, increasing budget allocation, and strengthening community participation are essential strategies to achieve modern, efficient, and sustainable drainage governance.*

**Keywords :** Capabilities, Public Works and Public Housing Agency, Drainage Management, Pekanbaru City.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Salah satu bentuk pelayanan dasar tersebut adalah penyediaan dan pengelolaan sistem drainase perkotaan yang berfungsi mengendalikan limpasan air hujan, mencegah banjir, serta menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Drainase perkotaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sistem drainase yang tidak terencana dan tidak terpelihara dengan baik berpotensi menimbulkan genangan, banjir, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan drainase harus dilaksanakan secara terpadu dengan tata ruang, didukung oleh perencanaan teknis yang memadai dan pemeliharaan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 12/PRT/M/2014.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau masih menghadapi permasalahan drainase yang cukup kompleks. Data Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023–2026 mencatat terdapat 121 titik banjir dan genangan dengan luas terdampak mencapai 294,36 hektare yang tersebar di berbagai kecamatan. Banjir berulang terjadi terutama pada wilayah dengan topografi rendah di sekitar Sungai Siak dan anak sungainya, diperparah oleh tingginya curah hujan, perubahan tata guna lahan, serta belum optimalnya fungsi saluran drainase. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru memiliki peran sentral dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan. Meskipun secara kelembagaan Dinas PUPR didukung oleh struktur organisasi dan unit teknis yang lengkap, upaya penanganan drainase yang dilakukan selama ini masih cenderung bersifat operasional dan reaktif, seperti pembersihan saluran dan penggerukan sedimen. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh perencanaan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi lintas bidang yang optimal.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga teknis yang kompeten, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kondisi infrastruktur yang telah menurun. Selain itu, masih ditemukan permasalahan tata kelola seperti lemahnya transparansi, perencanaan jangka panjang yang belum berbasis risiko, dan minimnya integrasi sistem informasi dalam pengelolaan drainase.

Dalam perspektif teori kapabilitas inti (core capabilities) Leonard-Barton (1992), organisasi publik dituntut memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan

kelembagaan yang terintegrasi untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan drainase di Kota Pekanbaru tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kapabilitas institusional Dinas PUPR dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sistem drainase perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengelola drainase perkotaan pada periode 2023-2024, sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan pengelolaan drainase yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengelola sistem drainase perkotaan pada periode 2023-2024?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengelola sistem drainase perkotaan pada periode 2023-2024.

## Tinjauan Teori

### Kapabilitas Inti (Core Capability)

Kapabilitas pada dasarnya merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan. Amir memaknai kapabilitas sebagai kemampuan mengeksplorasi sumber daya dan potensi organisasi, sementara Moenir menekankan kapabilitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Amir dan Schoemaker

memandang kapabilitas organisasi sebagai kapasitas untuk mengerahkan sumber daya melalui proses organisasi guna mencapai tujuan strategis, sekaligus meningkatkan produktivitas sumber daya yang dimiliki. Leonard-Barton (1992) mendefinisikan core capabilities sebagai kumpulan pengetahuan dan kemampuan khas yang menjadi keunggulan utama organisasi. Kapabilitas inti tersebut terdiri atas empat dimensi utama, yaitu:

- a) Knowledge and Skills (Pengetahuan dan Keterampilan)  
Pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia merupakan fondasi utama kapabilitas organisasi. Dalam konteks pengelolaan drainase, Dinas PUPR dituntut memiliki kompetensi teknis dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem drainase sesuai standar dan karakteristik wilayah.
- b) Technical Systems (Sistem Teknis)  
Sistem teknis mencakup prosedur kerja, sistem informasi, serta teknologi yang digunakan organisasi. Kapabilitas teknis Dinas PUPR tercermin dari kemampuan merancang dan mengelola jaringan drainase secara terpadu, termasuk pemantauan, evaluasi, dan penerapan teknologi pendukung dalam pengelolaan drainase.
- c) Managerial Systems (Sistem Manajerial)  
Sistem manajerial berkaitan dengan perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta koordinasi antarunit. Kapabilitas manajerial yang efektif memungkinkan Dinas PUPR menetapkan prioritas penanganan drainase secara rasional, efisien, dan berbasis data.
- d) Values and Norms (Nilai dan Norma)  
Nilai dan norma membentuk budaya organisasi dan memengaruhi perilaku kerja aparatur. Nilai seperti integritas, akuntabilitas, kedulian lingkungan, serta orientasi pelayanan publik menjadi elemen penting dalam memperkuat kapabilitas Dinas PUPR dalam pengelolaan drainase yang berkelanjutan.

## **Drainase**

Drainase merupakan sistem prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan dan mengendalikan kelebihan air dari suatu kawasan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari genangan maupun banjir. Sistem drainase perkotaan terdiri dari jaringan saluran tersier, sekunder, dan primer yang terintegrasi hingga menuju badan air penerima. Secara konseptual, drainase merupakan bagian penting dari infrastruktur kota yang harus dikelola dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Pengelolaan drainase yang efektif memerlukan dukungan kapabilitas institusional pemerintah daerah agar sistem dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengelola sistem drainase perkotaan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali proses, makna, serta dinamika organisasi yang tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Strauss dan Corbin (2007), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan melalui pemahaman terhadap kehidupan sosial, perilaku, serta fungsi organisasi. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai relevan untuk menganalisis aspek teknis, manajerial, dan kelembagaan dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengelola sistem drainase perkotaan. Metode deskriptif

kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada kondisi aktual tanpa melakukan manipulasi variabel. Menurut Nazir (2014), penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti status suatu objek, kelompok manusia, atau fenomena yang berlangsung pada masa sekarang dengan tujuan menyusun deskripsi yang komprehensif berdasarkan fakta di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji proses, kebijakan, serta praktik pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru secara mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan ilmiah, yaitu Kota Pekanbaru memiliki karakteristik perkotaan dengan tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi serta kompleksitas permasalahan sistem drainase. Kondisi tersebut menjadikan Kota Pekanbaru relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji kapabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan. Fokus penelitian diarahkan pada wilayah-wilayah rawan banjir di Kota Pekanbaru sebagai representasi permasalahan drainase yang dihadapi secara nyata..

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama yaitu, Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Sumber Daya Air, staf teknis pengelolaan drainase, serta masyarakat di wilayah rawan banjir. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, pelaksanaan, serta kendala pengelolaan sistem drainase di Kota Pekanbaru. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis guna melengkapi dan memperkuat data primer.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen dan arsip resmi. Data ini meliputi data titik-titik genangan dan lokasi banjir, peta titik banjir dan jaringan sungai, peta persebaran drainase Kota Pekanbaru tahun 2024, serta data titik prioritas penanganan drainase. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berupa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), data jumlah pegawai, data sarana dan prasarana pendukung seperti alat berat, serta struktur organisasi Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, salah satu sumber data utama diperoleh melalui informan penelitian yang dipilih untuk memberikan informasi yang relevan dengan fokus kajian. Informan berperan sebagai pihak yang memahami secara langsung fenomena pengelolaan sistem drainase di Kota Pekanbaru. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kesesuaian dan kompetensi mereka dengan fenomena yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan informan yang berkaitan dengan kompetensi, pengalaman, serta keterlibatan informan dalam pengelolaan drainase perkotaan (Hidayat, 2017). Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu menjawab rumusan masalah secara mendalam.

Untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua teknik ini dipilih untuk mendukung pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian.

## 1.Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi

secara mendalam terkait fenomena yang diteliti. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta kebijakan yang berkaitan dengan kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sistem drainase. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dan kerangka teori yang digunakan (Creswell, 2017).

## 2.Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, peta drainase, data titik banjir, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan drainase dan kapabilitas organisasi. Data dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan meningkatkan validitas penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman (dalam Suryabrata, 2018). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang data yang tidak berkaitan.

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks yang terstruktur sesuai dengan rumusan masalah dan dimensi kapabilitas yang diteliti. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses pemberian makna terhadap data yang telah

disajikan. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah diverifikasi secara berulang selama proses analisis, sehingga menghasilkan gambaran mengenai kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pengelolaan drainase perkotaan pada periode 2023-2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Knowledge and Skills (Pengetahuan dan Keterampilan)*

Pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam membentuk kapabilitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam pengelolaan drainase. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas PUPR memiliki tenaga teknis yang cukup terampil dan berpengalaman dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan sistem drainase.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Rendra Febriyanto, SE., MAK selaku Kepala Sub Bagian Umum Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang menyampaikan bahwa sebagian besar tenaga teknis telah terbiasa menangani pekerjaan drainase secara menyeluruh, mulai dari desain hingga pemeliharaan rutin. Dari delapan ASN yang terlibat, enam di antaranya berlatar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil, satu S1 Sosial, dan satu lulusan STM. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan teknis pengelolaan drainase.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di bidang drainase sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualifikasi pendidikan. Dominasi lulusan Teknik Sipil memperkuat kapabilitas Dinas PUPR dalam menjalankan fungsi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, serta evaluasi

infrastruktur drainase.

Keberadaan tenaga teknis yang kompeten mendukung pelaksanaan program pembangunan, rehabilitasi, dan normalisasi drainase agar sesuai dengan standar teknis dan tujuan pelayanan publik. Dengan demikian, aspek pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu kekuatan utama kapabilitas kelembagaan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pengelolaan drainase perkotaan.

#### ***Technical Systems (Sistem Teknis)***

Sistem teknis merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam pengelolaan drainase. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas PUPR telah memiliki sistem drainase yang dirancang secara berlapis, meliputi jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier. Sistem berlapis ini berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari kawasan permukiman menuju saluran utama sehingga dapat mengurangi risiko genangan dan banjir di wilayah perkotaan. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa sistem drainase di Kota Pekanbaru secara konseptual telah dirancang dengan prinsip pengendalian aliran permukaan melalui jaringan berlapis. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perencanaan teknis, Dinas PUPR telah memiliki instrumen yang relatif memadai dalam mengelola aliran air hujan.

Selain infrastruktur jaringan drainase, ketersediaan sarana pendukung berupa alat berat turut memperkuat kapasitas teknis organisasi dalam pelaksanaan operasional di lapangan. Alat berat digunakan untuk kegiatan normalisasi saluran, pengeringan sedimen, pembersihan sampah, serta rehabilitasi drainase. Keberadaan peralatan ini memungkinkan intervensi teknis dilakukan secara lebih cepat dan terukur, khususnya dalam menangani permasalahan sedimentasi dan penyumbatan saluran.

Berdasarkan data tersebut, Dinas PUPR Kota Pekanbaru memiliki delapan unit alat berat yang berfungsi menunjang kegiatan

pengelolaan drainase. Namun demikian, jumlah peralatan tersebut masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekanbaru dan kompleksitas permasalahan drainase yang tersebar di berbagai kecamatan. Keterbatasan ini berpotensi menghambat efektivitas operasional, terutama pada kondisi darurat banjir atau ketika terjadi peningkatan volume pekerjaan secara bersamaan.

Selain keterbatasan jumlah, tingginya biaya pemeliharaan alat berat juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kapasitas teknis. Apabila manajemen pemeliharaan tidak berjalan optimal, maka kondisi peralatan dapat menurun dan berdampak pada lambatnya penanganan di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bidang SDA berupaya memaksimalkan pemanfaatan peralatan yang ada melalui penentuan prioritas pekerjaan, pemeliharaan berkala, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan demikian, meskipun sistem teknis Dinas PUPR Kota Pekanbaru tergolong cukup memadai dari sisi perencanaan dan dukungan sarana, penguatan tetap diperlukan melalui penambahan jumlah alat berat, peningkatan manajemen pemeliharaan, serta pemanfaatan teknologi pendukung yang lebih modern. Penguatan ini penting agar kapabilitas teknis dalam pengelolaan drainase dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko genangan dan banjir perkotaan.

#### ***Managerial Systems (Sistem Manajerial)***

Sistem manajerial dalam pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru mencakup seperangkat kebijakan, prosedur, dan standar operasional (SOP) yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sistem ini berfungsi sebagai pedoman kerja yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan drainase, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan pemeliharaan.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru

menegaskan bahwa setiap kegiatan pengelolaan drainase wajib dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan keselamatan kerja melalui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajerial yang diterapkan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi antara efektivitas kerja dan perlindungan keselamatan petugas maupun masyarakat.

#### Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, manajemen menekankan koordinasi dan penugasan melalui penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK), penentuan lokasi atau rute pemeliharaan, serta pengecekan kesiapan alat kerja dan perlengkapan K3. Selain itu, pemasangan rambu peringatan di area kerja menjadi prosedur wajib untuk menjamin keselamatan pekerja dan pengguna jalan. Tahap ini mencerminkan adanya sistem kerja yang terencana dan terukur sebelum pekerjaan lapangan dilaksanakan.

#### Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeliharaan drainase dibedakan ke dalam tiga jenis kegiatan, yaitu:

1. Pemeliharaan rutin, yang bersifat preventif melalui inspeksi visual, pembersihan sampah, pengerukan sedimen ringan, serta pencatatan kondisi saluran.
2. Pemeliharaan berkala, yang bertujuan mengembalikan kapasitas dan dimensi saluran ke kondisi rencana awal melalui pengerukan sedimen berat, normalisasi saluran, dan perbaikan minor.
3. Pemeliharaan korektif, yang dilakukan untuk menangani kerusakan mendesak berdasarkan laporan masyarakat atau hasil inspeksi, meliputi survei lapangan, perbaikan struktur, hingga pengujian fungsi saluran.

Pembagian bentuk pemeliharaan ini menunjukkan bahwa sistem manajerial Dinas PUPR tidak hanya bersifat reaktif

terhadap kerusakan, tetapi juga proaktif dan preventif dalam menjaga keberlanjutan fungsi drainase.

#### Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian menekankan pada pembersihan lokasi kerja, pelepasan rambu K3, serta penyusunan laporan kegiatan secara rinci yang mencakup lokasi, jenis pekerjaan, volume material, penggunaan alat, dan dokumentasi. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada pengawas untuk diverifikasi dan diarsipkan. Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk kontrol, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan drainase.

#### Respons Masyarakat

Dari perspektif masyarakat, sistem manajerial yang diterapkan Dinas PUPR dinilai memberikan dampak positif. Warga merasakan saluran drainase yang lebih terawat, adanya pembersihan rutin, serta respons yang relatif cepat terhadap laporan kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajerial yang terstruktur turut meningkatkan kualitas pelayanan publik dan rasa aman Masyarakat.

#### Analisis

Dengan adanya SOP yang jelas, mekanisme pengaduan masyarakat, jadwal pemeliharaan berkala, serta monitoring dan evaluasi lapangan, sistem manajerial Dinas PUPR Kota Pekanbaru dapat dikatakan berjalan cukup efektif. Sistem ini tidak hanya mendukung kelancaran operasional teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi, keselamatan kerja, dan akuntabilitas organisasi. Namun demikian, efektivitas sistem manajerial tetap memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

#### **Values and Norms (Nilai dan Norma)**

Nilai dan norma organisasi memiliki peran strategis dalam membentuk budaya kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Nilai-nilai utama yang diinternalisasikan meliputi profesionalisme, integritas, orientasi

pelayanan publik, serta tanggung jawab sosial. Nilai dan norma tersebut menjadi landasan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan drainase dan pelayanan infrastruktur perkotaan. Salah satu nilai inti yang ditekankan adalah profesionalisme, yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar kompetensi, prosedur kerja, serta etika birokrasi. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru menegaskan bahwa profesionalisme dan integritas menjadi prinsip dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan, termasuk penanganan banjir, normalisasi drainase, dan perbaikan infrastruktur. Integritas tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, serta komitmen untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Penerapan nilai ini memungkinkan pelaksanaan program berjalan tepat waktu, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain profesionalisme, orientasi pelayanan publik menjadi nilai yang menonjol dalam tata kelola Dinas PUPR. Orientasi ini tercermin dari responsivitas terhadap keluhan masyarakat yang difasilitasi melalui kanal pengaduan resmi seperti SP4N-LAPOR dan call center. Aduan masyarakat, khususnya terkait genangan dan kerusakan saluran drainase, ditindaklanjuti melalui inspeksi lapangan dan kegiatan pemeliharaan. Transparansi juga dikedepankan melalui pelaporan kegiatan normalisasi, penggunaan anggaran, serta pemanfaatan alat berat dalam penanganan banjir. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari sisi norma, aparatur Dinas PUPR menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap regulasi, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal. Norma regulatif berfungsi sebagai instrumen pengendali yang memastikan setiap kebijakan dan tindakan operasional

dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan standar administrasi. Selain itu, norma sosial berupa kerja sama dan kolektivitas juga menonjol, mengingat pengelolaan drainase menuntut koordinasi lintas bidang serta sinergi dengan pihak eksternal dan masyarakat.

Norma lain yang dijunjung tinggi adalah disiplin dan integritas, yang tercermin dalam kepatuhan terhadap jam kerja, ketepatan waktu penyelesaian tugas, serta konsistensi dalam menjalankan prosedur operasional. Integritas diwujudkan melalui penolakan terhadap praktik gratifikasi dan pelanggaran etika, sehingga memperkuat akuntabilitas dan legitimasi organisasi.

Dari perspektif masyarakat, nilai dan norma tersebut dirasakan secara nyata. Warga menilai adanya peningkatan responsivitas aparatur dalam menangani banjir dan kerusakan drainase, serta pendekatan yang lebih dialogis dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan permukiman. Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab sosial, di mana aparatur tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kenyamanan masyarakat.

Nilai dan norma yang berkembang di lingkungan Dinas PUPR Kota Pekanbaru tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu aparatur, tetapi juga membentuk karakter organisasi yang profesional, responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Nilai dan norma tersebut menjadi elemen penting dalam memperkuat kapabilitas kelembagaan Dinas PUPR dalam pengelolaan drainase perkotaan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengelola drainase di Kota Pekanbaru pada periode 2023–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, ditinjau dari aspek pengetahuan dan keterampilan (knowledge and skills), Dinas PUPR Kota Pekanbaru secara umum telah didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis yang memadai, khususnya dalam bidang perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan drainase. Mayoritas aparatur memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil serta pengalaman kerja yang relevan di lapangan. Meskipun demikian, kemampuan teknis tersebut masih perlu ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan dan penguasaan teknologi mutakhir agar pengelolaan drainase dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kedua, pada aspek sistem teknis (technical systems), pengelolaan drainase di Kota Pekanbaru masih didominasi oleh pendekatan konvensional. Proses pemantauan, pemetaan, dan evaluasi kondisi drainase sebagian besar dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan kapabilitas teknis institusi, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital seperti Geographic Information System (GIS) maupun sistem pemantauan debit air secara real time yang berpotensi meningkatkan akurasi perencanaan dan respons terhadap risiko banjir.

Ketiga, dari aspek sistem manajerial (managerial systems), Dinas PUPR Kota Pekanbaru telah memiliki struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta mekanisme koordinasi yang secara formal telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 dan Nomor 154 Tahun 2021. Namun, dalam implementasinya, sistem manajerial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, koordinasi lintas bidang yang belum optimal, serta pola pengambilan keputusan

yang cenderung bersifat reaktif terhadap kondisi darurat di lapangan, dibandingkan berbasis analisis risiko dan data teknokratik yang komprehensif.

Keempat, ditinjau dari aspek nilai dan norma (values and norms), nilai-nilai pelayanan publik, integritas, dan tanggung jawab sosial telah mulai terinternalisasi dalam budaya kerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Aparatur menunjukkan komitmen dalam merespons keluhan masyarakat dan menjalankan tugas pelayanan publik. Namun demikian, praktik transparansi dan akuntabilitas publik masih belum sepenuhnya optimal, sebagaimana terlihat dari masih ditemukannya proyek drainase yang tidak dilengkapi dengan papan informasi kegiatan.

Kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pengelolaan drainase dapat dikategorikan cukup baik, namun belum optimal. Dinas PUPR telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan perencanaan, tetapi masih memerlukan penguatan pada sistem teknis berbasis teknologi, peningkatan efektivitas koordinasi manajerial lintas sektor, serta penguatan internalisasi nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai Kapabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengelola drainase di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024, Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, disarankan untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan drainase melalui modernisasi sarana dan prasarana teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial. Selain itu, perlu dilakukan

penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaan proyek drainase berjalan sesuai standar teknis dan prinsip akuntabilitas.

Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur perkotaan serta meningkatkan alokasi anggaran secara proporsional dan berkelanjutan guna mendukung kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase sebagai upaya mitigasi banjir.

Bagi masyarakat, perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran drainase, serta mendukung program pemerintah melalui kepatuhan terhadap aturan dan pelaporan kondisi drainase yang bermasalah, sehingga pengelolaan drainase dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, khususnya pada aspek evaluasi kebijakan pengelolaan drainase perkotaan dan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Everitt, B. S., & Howell, D. C. (2005). *Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Farida, N. (2008). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sri Harto. (1993). *Hidrologi terapan*. Yogyakarta: Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil UGM.
- Suripin. (2004). *Sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suryabrata, S. (2018). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adrian Pratama. (2025). Pemeliharaan drainase di Kota Pekanbaru. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(1), 105–117. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i1.527>
- Alfihad, M. Y. (2024). Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Suara Politik*, 3(2), 36–47.
- Ardiansyah, Kadaryanto, B., & Rani, N. P. (2018). Pelaksanaan pembangunan drainase Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014. *Jurnal Dinamika Madani*, 1(1), 49–62.
- Hurlimann, M. D. (2007). Kajian pembangunan. *Combustion Science and Technology*, 21(5–6), 1–49. <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>
- Leonard-Barton, D. (1992). Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development. *Strategic Management Journal*, 13(S1), 111–125. <https://doi.org/10.1002/smj.4250131009>
- Meilani, W., Sylviana, R., Juliandra, L., & Iskandar, T. (2024). Efisiensi, perawatan, dan pemeliharaan drainase Desa Sumbersari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i4.734>

- Suwana, A. (2020). Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan dan drainase. *Jurnal Trias Politika*, 4(1), 100–109.
- Wahda, J. (2023). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola drainase di Kota Pekanbaru. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9178–9188.
- Wulandari, A. P. (2024). Evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pemeliharaan saluran drainase. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 378–389
- Pratama, F. (2024). *Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Susilawati, E. (2019). *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
- Hidayat, A. (2017). *Purposive sampling: Pengertian, tujuan, contoh, dan langkah-langkah*. Statistikian. <https://www.statistikian.com>
- Olivia, L. (2023). Muflihun akui drainase tersumbat jadi biang kerok banjir di Pekanbaru. *Riau Online*. <https://www.riauonline.co.id>
- Susanti, U. (2023). Jadi penyebab banjir, PUPR Pekanbaru temukan sesuatu di drainase Jalan Soebrantas. *Cakaplah*. <https://www.cakaplah.com>
- Thabroni, G. (2022, April 27). Metode penelitian deskriptif kualitatif (konsep & contoh). *Serupa.id*. <https://serupa.id>